

**PERSPEKTIF TEORI MODERNISASI
PADA PERAN DAERAH OTONOM
TERHADAP KETAHANAN PANGAN NASIONAL
(STUDI KASUS KOMODITAS KEDELAI
DI KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR)**

Oleh: Sayuti

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: oeti_java@yahoo.com

ABSTRACT

The highest soybean productivity areas, and a decrease in harvested area are two contradictory empirical conditions Banyuwangi District with a role as a national soybean area development locations, to support national food security. The aim of research describes the perspective of modernization theory on the role of Banyuwangi to national food security. Research using qualitative method with secondary data according to time series. Data were collected through a written document from the literature and analyzed with descriptive approach. Specialization activities and community work Banyuwangi District as the location of the national soybean development, showing the role to ensure the availability of the national soybean. The highest productivity of soybean, soybean development of new varieties (VUB), pilot Degree Technology Innovation Ministry of Agriculture, shows Banyuwangi role in national food security in the perspective of modernization theory reflect the need for achievement (n-ach), and a passion to work hard for success. In accordance modernization theory perspective, the decline in soybean harvested area due to land conversion, and competition from more profitable commodities, can be overcome by strengthening institutional and investment.

Keywords: modernization theory; role region; food security

ABSTRAK

Daerah berproduktivitas kedelai tertinggi, dan penurunan luas panen merupakan dua kondisi empiris kontradiktif Kabupaten Banyuwangi dengan peran sebagai lokasi pengembangan kawasan kedelai nasional, untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tujuan penelitian menggambarkan perspektif teori modernisasi pada peran Kabupaten Banyuwangi terhadap ketahanan pangan nasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder menurut deret waktu. Data dikumpulkan melalui dokumen tertulis dari hasil studi pustaka dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Spesialisasi aktivitas dan pekerjaan masyarakat Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi pengembangan kedelai nasional, menunjukkan peran untuk menjamin ketersediaan kedelai nasional. Produktivitas kedelai tertinggi, pengembangan kedelai varietas unggul baru (VUB), percontohan Gelar Inovasi Teknologi Kementerian Pertanian, menunjukkan peran Banyuwangi dalam ketahanan

pangan nasional yang dalam perspektif teori modernisasi merefleksikan *need for achievement* (*n-ach*), dan semangat bekerja keras untuk sukses. Sesuai perspektif teori modernisasi, penurunan luas panen kedelai karena alih fungsi lahan, dan persaingan dengan komoditas yang lebih menguntungkan, dapat diatasi dengan penguatan kelembagaan dan investasi.

Kata kunci: teori modernisasi; peran daerah; ketahanan pangan

PENDAHULUAN

Pembangunan diartikan membuat kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang. Dalam konteks saat ini dengan dunia yang tidak seimbang, kehidupan yang lebih baik bagi banyak orang berarti terpenuhinya kebutuhan dasar: tersedianya makanan untuk mempertahankan kesehatan yang baik, aman, nyaman, keterjangkauan pelayanan bagi setiap orang, diperlakukan bermartabat dan dihargai (Peet dan Hartwick, 2009).

Berbagai teori pembangunan bermunculan untuk menanamkan pengaruh dan dominasinya dengan menawarkan serangkain konsep teoritis, dan gagasan-gagasan kearah perubahan yang lebih baik. Begitupun Indonesia, juga tidak luput dari berbagai pertarungan teori pembangunan tersebut untuk direplikasi. Mengelak dari berbagai teori pembangunan tersebut adalah suatu ketidakniscayaan, tetapi yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai replikasi teori-teori pembangunan tersebut menjadi perangkap (*trap*), sehingga menyebabkan makna pembangunan menjadi bias dalam pandangan masyarakat. Untuk itu, dalam replikasi suatu teori pembangunan hendaknya dapat diadaptasikan agar dapat lebih membumi, mendasar dan berakar pada masyarakat Indonesia.

Badan Pangan Dunia (FAO) menginterpretasikan ketahanan

pangan sebagai kemampuan menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh penduduk sepanjang tahun dengan harga terjangkau untuk dapat hidup sehat dan aktif (Fagi dan Syam, 2002). Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, disebutkan bahwa ketahanan pangan adalah terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau. Menurut Supadi (2009), ada tiga hal penting yang terkait dengan ketahanan pangan yaitu ketersediaannya (*availability*), stabilitas (*stability*), dan keterjangkauan (*accessibility*), ketiga elemen ketahanan pangan itu saling terkait satu sama lain. Ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dengan ketahanan nasional. Globalisasi perdagangan dapat membuat harga pangan tidak stabil, terutama karena berkurangnya stok yang dimiliki masing-masing negara. dengan berkurangnya stok, maka intervensi ke pasar khususnya negara-negara pengekspor akan berkurang sehingga pasokan berkurang dan akan memengaruhi stabilitas harga.

Konsep ketahanan pangan dapat dilihat dari segi individu dan nasional. Konsep ketahanan pangan di tingkat individu mengacu pada suatu keadaan yang dapat menjamin setiap individu di manapun, kapanpun untuk memperoleh pangan agar dapat mempertahankan hidup sehat. Sedangkan konsep ketahanan pangan nasional berarti adanya jaminan

kecukupan pangan dan gizi di tingkat nasional dari waktu ke waktu. Untuk menjamin ketahanan pangan nasional sampai tingkat individu, ketersediaan pangan dan keterjangkauan aksesnya oleh semua orang merupakan dua syarat penting. Ketidakseimbangan antara ketersediaan dan akses dapat menyebabkan ancaman ketahanan pangan (*food insecurity*). Bukti empiris menunjukkan bahwa rapuhnya ketahanan pangan nasional suatu negara dapat memicu timbulnya goncangan ekonomi dan meningkatnya kriminalitas (Suryana, 2001 dalam Supadi, 2009).

Peningkatan ketahanan pangan merupakan program utama Departemen Pertanian yang berdampingan dengan upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian (Sinulingga, 2006). pada kenyataannya Indonesia telah melakukan impor kedelai sejak tahun 1975 untuk memenuhi konsumsi dalam negeri (Tani, 2006). Menurut Rasahan (1999) ketergantungan kepada bahan pangan dari luar negeri dalam jumlah besar akan melumpuhkan ketahanan nasional dan mengganggu stabilitas sosial, ekonomi dan politik. Ketahanan pangan dan kedaulatan pangan berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Untuk itu, Baharsjah (2004) mengatakan, langkah swasembada harus ditempuh karena ketergantungan yang makin besar pada impor bisa menjadi musibah terutama jika harga dunia sangat mahal akibat stok menurun. Menurut Pulungan (2008) ketahanan pangan dalam arti kemandirian pangan bisa dijamin bila produksi dalam negeri setidaknya 90 persen dari total konsumsi. Impor pangan termasuk kedelai dalam jumlah besar merupakan hal yang menyedihkan.

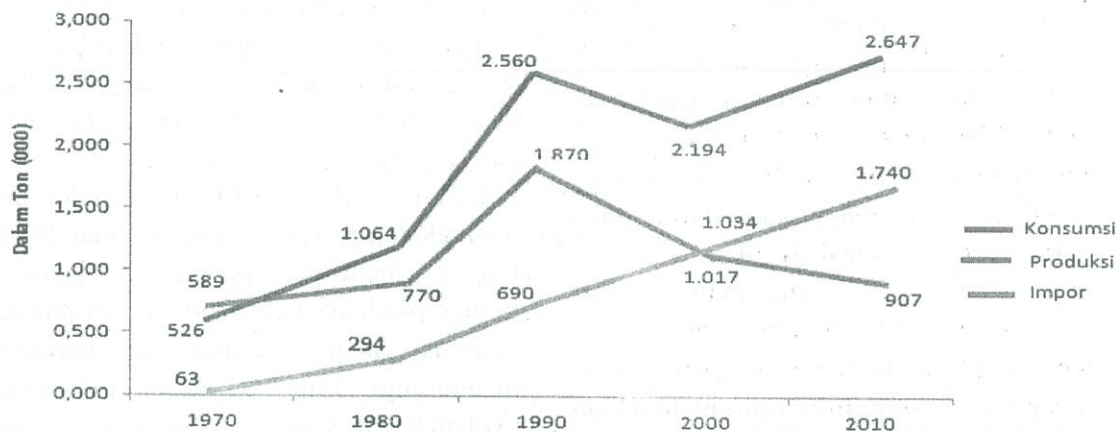
Meskipun pada periode 1970 hingga 1980 jumlah impor kedelai Indonesia masih terhitung sedikit yaitu hanya berkisar 150.000–200.000 ton kedelai, namun ternyata impor kedelai pada periode berikutnya terus mengalami peningkatan. pada tahun 1980 hingga 1990, impor kedelai meningkat jumlahnya mencapai 500.000–800.000 ton per tahun. pada tahun 1990–2000, impor kedelai meningkat kembali pada angka 900.000–1.500.000 ton per tahun. Bahkan pasca tahun 2000 hingga tahun 2010, impor kedelai semakin meningkat dengan angka rata-rata impor kedelai hampir mencapai 2.000.000 ton per tahun, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kedelai terbesar dunia, namun juga pada saat yang bersamaan Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor terbesar di dunia (Pangan, 2005). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sampai pada tahun 2012, jumlah produksi kedelai Indonesia adalah sebesar 783.158 ton (B. P., Tanaman Pangan, 2012). dengan jumlah produksi seperti itu, produksi kedelai Indonesia menempati urutan ke-10 terbesar dunia dan Indonesia menyumbang 0,3% total produksi kedelai secara global. Apabila meninjau produksi kedelai Indonesia sejak tahun 1975 yang hanya berjumlah 526.000 ton, ternyata Indonesia telah berhasil mendorong peningkatan produksi sampai tahun 1995 hingga mencapai puncaknya dengan jumlah produksi 1.680.000 ton. Meskipun demikian, angka tersebut tidak berhasil mengurangi impor kedelai Indonesia (Yohanes, 2013).

Nampaknya, produksi kedelai mempunyai keterkaitan dengan luas area pertanaman kedelai. Apabila jumlah area

pertanaman kedelai semakin luas, maka hasil produksi kedelai juga semakin meningkat, sebaliknya apabila jumlah area pertanaman kedelai semakin menyempit, maka produksi kedelai juga akan menurun. Yohanes (2013) menguraikan, data dari tahun 1975 hingga 1995 menunjukkan bahwa peningkatan produksi kedelai didukung dengan peningkatan jumlah luas lahan pertanaman kedelai. Dari sini sebenarnya dapat terlihat bahwa telah ada upaya dari Pemerintah Indonesia untuk mengurangi impor kedelai yang terus meningkat sejak tahun 1975. pada periode 1983-1995 sebagai contoh, Pemerintah Indonesia telah berhasil untuk mendorong peningkatan produksi melalui peningkatan perluasan lahan pertanian kedelai dan peningkatan produktivitas lahan (Supadi, 2009). dengan kata lain sebagai perbandingan, luas lahan pertanian kedelai pada tahun 1975 mencapai 768.000 hektar yang mampu memproduksi 589.000 ton kedelai, dan pada tahun 1995 luas area pertanian kedelai

mencapai 1.477.000 hektar dan mampu memproduksi 1.680.000 ton kedelai. Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara luas area pertanian memengaruhi jumlah produksi kedelai yang dihasilkan. Namun sangat disayangkan, peningkatan produksi kedelai Indonesia pada periode 1983-1995 ternyata tidak diikuti tahun-tahun berikutnya. pada kenyataannya, semenjak tahun 1995 produksi kedelai terus mengalami penurunan hingga saat ini sejalan dengan penurunan area pertanian kedelai dan produktivitas lahan pertanian kedelai (Harsono, 2008).

Impor kedelai yang terus meningkat, dibarengi dengan tingkat konsumsi yang juga meningkat karena pertumbuhan laju penduduk, dan pada saat yang bersamaan juga terjadi penurunan luas lahan pertanaman kedelai, menjadi kekhawatiran bahwa dalam jangka panjang Indonesia tidak akan bisa melepaskan diri dari defisit produksi kedelai untuk dapat secara mandiri menyediakan kedelai bagi konsumsi masyarakat.



Gambar 1.

Grafik Konsumsi, Produksi dan Impor Kedelai Indonesia 1970–2010

(Sumber: Badan Pusat Statistik 2012, Sumber Tani (Diolah) dalam Yoannes, 2013)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai salah satu daerah di antara beberapa daerah lainnya di Indonesia sebagai lokasi pengembangan kawasan kedelai. Penetapan tersebut didasarkan pada alasan bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan lumbung kedelai dan penghasil kedelai terbesar di Provinsi Jawa Timur. Purba (2013) menjelaskan Kabupaten Banyuwangi berhasil memberikan kontribusi sebesar 17,28% terhadap produksi kedelai Jawa Timur. Sedangkan produksi kedelai Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi sebesar 42,51% terhadap produksi kedelai nasional. dengan capaian tersebut, maka Provinsi Jawa Timur dinyatakan sebagai provinsi penghasil kedelai terbesar di Indonesia.

Gunawan dalam Purba (2013) menyatakan, petani Banyuwangi mampu memanen rata-rata 66.094 ton dengan produktivitas rata-rata mencapai 19,68 kuintal per hektare, sehingga tercatat sebagai daerah dengan produktivitas tertinggi di Indonesia. Sementara itu, produktivitas kedelai Provinsi Jawa Timur mencapai 15,45 kuintal per ha, produktivitas kedelai nasional hanya 13,75 kuintal per ha berada jauh dibandingkan angka produktivitas petani kedelai Kabupaten Banyuwangi.

Luas lahan komoditas kedelai di Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya rata-rata mencapai 36.068 ha. Luasan tersebut belum termasuk di lahan lembaga masyarakat desa hutan yang sulit dipantau,

ternyata ikut menyumbang produksi kedelai di Banyuwangi. Keberhasilan Banyuwangi sebagai lumbung kedelai mulai menemui hambatan. Berdasarkan data statistik tiga tahun terakhir, luas pertanaman kedelai mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya alih fungsi lahan dan persaingan dengan komoditas lainnya yang lebih menguntungkan utamanya tanaman jeruk dan buah naga (Gunawan dalam Purba, 2013).

Mengacu pada uraian di atas, ditetapkannya Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi pengembangan kedelai nasional, bukannya tanpa alasan apabila dikaitkan dengan ketahanan pangan nasional. Keberhasilan Kabupaten Banyuwangi yang berkontribusi signifikan pada produksi kedelai Provinsi Jawa Timur, menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai penghasil kedelai terbesar di Indonesia. Demikian pula, keberhasilan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah dengan produktivitas kedelai tertinggi di Indonesia, merupakan capaian prestasi yang dapat berkontribusi penting sebagai daerah penyangga (*buffer zone*) ketahanan pangan nasional. Namun demikian, patut menjadi perhatian bahwa terdapatnya luas pertanaman kedelai yang mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir di Kabupaten Banyuwangi, akan berdampak pada peningkatan produksi kedelai karena luas area pertanian memengaruhi jumlah produksi kedelai yang dihasilkan.

Tujuan

Penelitian bertujuan untuk menggambarkan perspektif teori modernisasi pada peran Kabupaten Banyuwangi terhadap ketahanan pangan nasional.

METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan data yang digunakan berupa data sekunder menurut deret waktu (*time series*). Data dikumpulkan melalui dokumen tertulis dari hasil studi pustaka. Adapun analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Modernisasi

- *Sejarah Singkat*

Tanggal 20 Januari 1949, Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman kali pertama menyitir istilah “*developmentalism*”. Untuk selanjutnya, ia mempropagandakan istilah *under-development* bagi negara-negara bekas jajahan agar mampu meredam pengaruh Komunisme-Sosialisme sebagai tawaran ideologi pembangunan (Gill, 1993).

Teori Modernisasi lahir ditahun 1950-an di Amerika Serikat, dan merupakan respon kaum intelektual terhadap Perang Dunia yang bagi penganut evolusi dianggap sebagai jalan optimis menuju perubahan. Modernisasi menjadi penemuan teori yang terpenting dari perjalanan kapitalisme yang panjang di bawah kepemimpinan Amerika Serikat. Teori ini lahir dalam suasana ketika dunia memasuki ‘perang dingin’ antara negara-negara Komunis di bawah pimpinan Negara Sosialis Uni Sovyet Rusia (USSR). Perang dingin merupakan bentuk peperangan ideologi dan teori antara kapitalisme dan sosialisme. Sementara itu gerakan sosialisme Rusia mulai mengembangkan pengaruhnya tidak saja di Eropa Timur, melainkan juga di negara-negara yang baru merdeka. dengan

demikian dalam konteks perang dingin tersebut teori modernisasi terlibat dalam peperangan ideologi (Fakih, 2002)

- *Konsep Dasar Teori*

Secara etimologis, ada beberapa tokoh yang mengajukan pendapat tentang makna modernisasi. Everett M. Rogers dalam “*Modernization Among Peasants: The 10 Impact of Communication*” menyatakan bahwa modernisasi merupakan proses di mana individu berubah dari cara hidup tradisional menuju gaya hidup lebih kompleks dan maju secara teknologis serta cepat berubah.

Cyril E. Black dalam “*Dinamics of Modernization*” berpendapat bahwa secara historis modernisasi adalah proses perkembangan lembaga-lembaga secara perlahan disesuaikan dengan perubahan fungsi secara cepat dan menimbulkan peningkatan yang belum pernah dicapai sebelumnya dalam hal pengetahuan manusia. dengan pengetahuan tersebut, akan memungkinkan manusia untuk menguasai lingkungannya dan melakukan revolusi ilmiah.

Daniel Lerner dalam “*The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East*” menyatakan bahwa modernisasi merupakan suatu *trend unilateral* yang sekuler dalam mengarahkan cara-cara hidup dari tradisional menjadi partisipan. Marion Ievy dalam “*Modernization and the Structure of Societies*” juga menyatakan bahwa modernisasi adalah adanya penggunaan ukuran rasio sumberdaya kekuasaan, jika makin tinggi rasio tersebut, maka modernisasi akan semakin mungkin terjadi. Dari beberapa definisi

tersebut, modernisasi dapat dipahami sebagai sebuah upaya tindakan menuju perbaikan dari kondisi sebelumnya. Selain upaya, modernisasi juga berarti proses yang memiliki tahapan dan waktu tertentu dan terukur.

Teori Pembagian Kerja Secara Internasional, yang didasarkan pada Teori Keuntungan Komparatif yang dimiliki oleh setiap negara, mengakibatkan terjadinya spesialisasi produksi pada tiap-tiap negara sesuai dengan keuntungan komparatif yang dimilikinya. Oleh karena itu, secara umum, di dunia ini terdapat dua kelompok negara: (1) negara yang memproduksi hasil pertanian, dan (2) negara yang memproduksi barang industri. Antara kedua kelompok negara ini terjadi hubungan saling dagang, dan saling diuntungkan. Tetapi setelah beberapa puluh tahun kemudian, negara-negara industri semakin kaya, seangkan negara-negara pertanian semakin tertinggal (Budiman, 1995).

Asumsi dasar dari teori modernisasi mencakup: (1) Bertolak dari dua kutub dikotomis yaitu antara masyarakat modern (masyarakat negara-negara maju) dan masyarakat tradisional (masyarakat negara-negara berkembang); (2) Peranan negara-negara maju sangat dominan dan dianggap positif, yaitu dengan menularkan nilai-nilai modern disamping memberikan bantuan modal dan teknologi. Tekanan kegagalan pembangunan bukan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal melainkan internal; (3) Resep pembangunan yang ditawarkan bisa berlaku untuk siapa, kapan dan di mana saja (Budiman dalam Frank, 1984).

Adapun penopang dari Teori Modernisasi adalah ide Weber yang

melihat pada aspek-aspek nilai budaya yaitu Variabel etos sebagai varian utama dalam melihat keterbelakangan dunia ketiga. Tesis ini diperkuat oleh McClelland yang menekankan psikologi individu dan menekankan bahwa kondisi psikologis prakondisi suatu masyarakat dalam memandang prestasi (*the need for achievement*) secara signifikan berkorelasi positif terhadap kelangsungan pembangunan. Selain itu Teori Modernisasi juga melihat bahwa masalah pembangunan merupakan masalah penyediaan modal untuk investasi (Harrod-Domar). Gagasan ide ini kemudian dikembangkan oleh Rostow bahwa pembangunan dikaitkan dengan perubahan dari masyarakat agraris dengan budaya tradisional ke masyarakat yang rasional, industrial dan berfokus pada ekonomi pelayanan. Ide ini kemudian melahirkan konsep lima tahap pembangunan Rostow. Berbeda dengan Rostow Bert F. Hoselitz membahas faktor-faktor non ekonomi yang ditinggalkan Rostow yang disebut faktor "kondisi lingkungan". Kondisi lingkungan maksudnya adalah perubahan-perubahan pengaturan kelembagaan yang terjadi dalam bidang hukum, pendidikan, keluarga, dan motivasi. Hoselitz menekankan bahwa meskipun seringkali orang menunjukkan bahwa masalah utama pembangunan adalah kekurangan modal (teori Harrod-Domar), ada masalah lain yang juga sangat penting yakni adanya ketrampilan kerja tertentu, termasuk tenaga wiraswasta yang tangguh. Karena itu dibutuhkan perubahan kelembagaan pada masa sebelum lepas landas, yang akan memengaruhi pemasokan modal, supaya modal ini bisa menjadi produktif. Perubahan kelembagaan ini

akan menghasilkan tenaga wiraswasta dan administrasi serta ketrampilan teknis dan keilmuan yang dibutuhkan. Menurut Hoselitz, pembangunan membutuhkan pemasokan dari beberapa unsur, seperti: pemasokan modal besar dan perbankan, serta pemasokan tenaga ahli dan terampil. Perspektif umum Teori modernisasi memandang pembangunan merupakan kerja secara Internasional yang didasarkan pada teori keuntungan komparatif yang dimiliki oleh setiap negara mengakibatkan terjadinya spesialisasi produksi pada tiap-tiap negara sesuai dengan keuntungan komparatif yang dimilikinya (Kamiel, 2011).

Pengembangan Kawasan Pertanian dan Komoditas Tanaman Pangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, berikut ini diberikan deskripsi singkat pengembangan kawasan pertanian.

Pendekatan pengembangan kawasan dirancang untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, efisiensi anggaran dan mendorong keberlanjutan kawasan komoditas unggulan. Sentra pertanian diartikan sebagai bagian dari kawasan yang memiliki ciri tertentu di mana di dalamnya terdapat kegiatan produksi suatu jenis produk pertanian unggulan. Adapun kawasan pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala efektivitas manajemen pembangunan wilayah.

Kawasan pertanian menurut administrasi pengelolaannya terdiri dari: (1)

Kawasan Pertanian Nasional; (2) Kawasan Pertanian Provinsi; dan (3) Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota dengan kriteria untuk masing-masing kawasan sebagai berikut:

- a. Kawasan Pertanian Nasional merupakan kawasan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dengan kriteria:
 1. memiliki kontribusi produksi yang signifikan atau berpotensi tinggi terhadap pembentukan produksi nasional;
 2. difasilitasi oleh APBN dan didukung APBD provinsi/kabupate/kota;
 3. mengembangkan 40 komoditas unggulan nasional sesuai Renstra Kementan.
- b. Kawasan Pertanian Provinsi adalah kawasan yang ditetapkan oleh Gubernur dengan kriteria:
 1. memiliki kontribusi produksi yang signifikan atau berpotensi tinggi terhadap pembentukan produksi provinsi;
 2. difasilitasi oleh APBD provinsi dan dapat didukung APBN sebagai pendamping (untuk provinsi yang mengembangkan 40 komoditas unggulan nasional);
 3. mengembangkan komoditas unggulan provinsi dan/atau 40 komoditas unggulan nasional.
- c. Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota adalah kawasan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan kriteria:
 1. memiliki kontribusi produksi yang signifikan atau berpotensi tinggi terhadap produksi kabupaten/kota;

2. difasilitasi oleh APBD kabupaten/kota dan didukung oleh APBN sebagai pendamping (untuk kabupaten yang mengembangkan 40 unggulan nasional), serta dapat didukung oleh APBD provinsi (untuk kabupaten yang mengembangkan komoditas unggulan provinsi);
3. mengembangkan komoditas unggulan kabupaten/kota, komoditas unggulan provinsi dan/atau komoditas 40 unggulan nasional.

Terdapat 7 (tujuh) komoditas tanaman pangan unggulan nasional yang dikembangkan pada kawasan pertanian yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Komoditas unggulan lainnya yaitu 11 (sebelas) komoditas hortikultura, 15

(lima belas) komoditas perkebunan dan 7 (tujuh) komoditas peternakan, sehingga secara keseluruhan terdapat 40 (empat puluh) komoditas unggulan nasional yang dikembangkan pada kawasan pertanian.

Perkembangan. Kedelai di Kabupaten Banyuwangi

Luas panen kedelai Kabupaten Banyuwangi berdasarkan data BPS sebagaimana pada Tabel 1 di bawah ini menunjukkan, dari tahun 2010 hingga 2012 terjadi penurunan area pertanaman kedelai, kemudian terjadi peningkatan tahun 2013. Namun demikian, terjadi lagi penurunan luas panen dari tahun 2014 hingga 2015. Tahun 2010 hingga 2015 terjadi penurunan rata-rata luas panen pertanaman kedelai sebesar 5,50%.

Tabel 1
Luas Panen Kedelai menurut Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2010-2015

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pesanggaran	3.400	4.392	1.921	2.330	2.519	3.208
2	Siliragung	2.539	2.953	849	870	1.515	894
3	Bangorejo	1.940	2.507	2.245	3.325	2.750	2.503
4	Purwoharjo	8.791	7.570	5.851	8.174	6.066	4.364
5	Tegaldlimo	8.925	7.617	6.231	8.783	8.001	6.612
6	Muncar	4.065	3.778	4.170	3.655	3.365	3.267
7	Cluring	960	1.644	1.895	2.421	1.192	1.662
8	Gambiran	1.885	1.506	1.550	851	277	337
9	Tegalsari	705	991	836	988	440	693
10	Glenmore	0	0	0	0	0	0
11	Kalibaru	0	0	0	0	0	0
12	Genteng	135	84	286	135	65	176
13	Srono	982	1.106	770	777	70	128
14	Rogojampi	739	683	404	282	110	81
15	Kabat	0	250	50	18	180	0

16	Singojuruh	8	14	4	2	0	39
17	Sempu	1.142	300	0	1.160	640	1.167
18	Songgon	70	124	0	0	0	0
19	Glagah	0	0	0	0	2	0
20	Licin	0	0	0	0	0	0
21	Banyuwangi	31	4	0	0	0	0
22	Giri	0	0	0	0	0	0
23	Kalipuro	5	20	25	0	115	20
24	Wongsorejo	590	525	170	250	550	633
Banyuwangi		36.912	36.068	27.257	34.021	27.857	25.784

Sumber: BPS Kab. Banyuwangi, 2011-2016

Sesuai Tabel 1 di atas, pada tahun 2015 dari 24 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, terdapat 16 kecamatan yang mempunyai luas panen pertanaman kedelai. Kecamatan yang mempunyai luas panen terbesar yaitu Kecamatan Tegaldlimo seluas 6.612 Ha atau 25,64% dari keseluruhan luas panen di Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 2 di bawah ini menjelaskan adanya keterkaitan antara produksi kedelai dengan luas area pertanaman. Apabila jumlah area pertanaman kedelai semakin luas, maka hasil produksi kedelai juga semakin meningkat, sebaliknya apabila jumlah area pertanaman semakin menyempit, maka produksi kedelai juga akan menurun.

Tabel 2
Produksi Kedelai menurut Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2010-2015

No	Kecamatan	Produksi (Ton)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pesanggaran	5.439	7.914	3.462	4.241	4.537	5.771
2	Siliragung	4.037	5.541	1.423	1.586	2694	1.560
3	Bangorejo	2.919	4.641	4.292	6.374	4561	4.684
4	Purwoharjo	16.444	13.752	12.761	17.081	11762	9.094
5	Tegaldlimo	16.757	13.853	12.537	17.724	14098	11.965
6	Muncar	6.498	6.817	8.186	7.672	7467	6.204
7	Cluring	1.535	3.291	3.530	4.547	1942	2.749
8	Gambiran	4.288	2.695	2.829	1.614	449	564
9	Tegalsari	1.146	1.631	1.558	1.859	719	1152
10	Glenmore	0	0	0	0	0	0
11	Kalibaru	0	0	0	0	0	0
12	Genteng	212	159	560	244	85	257
13	Srono	1.547	2.201	1.412	1.448	124	205

14	Rogojampi	1.126	1.350	677	531	170	123
15	Kabat	0	477	84	33	285	0
16	Singojuruh	12	25	7	4	0	58
17	Sempu	1.805	570	0	2.102	1.033	1.860
18	Songgon	85	175	0	0	0	0
19	Glagah	0	0	0	0	2	0
20	Licin	0	0	0	0	0	0
21	Banyuwangi	49	7	0	0	0	0
22	Giri	0	0	0	0	0	0
23	Kalipuro	8	37	42	0	173	30
24	Wongsorejo	950	958	289	444	921	1.037
Banyuwangi		64.857	66.094	53.648	67.441	51.021	47.313

Sumber: BPS Kab. Banyuwangi, 2011-2016

Tabel 2 di atas menjelaskan, pada tahun 2012, 2014, dan 2015, terjadi penurunan produksi kedelai seiring dengan adanya penurunan jumlah area luas pertanaman kedelai. Tahun 2013 terjadi peningkatan produksi karena adanya peningkatan jumlah area luas pertanaman kedelai dibandingkan tahun 2012. Namun demikian, pada tahun 2011 walaupun terjadi penurunan jumlah area luas pertanaman kedelai dibandingkan tahun 2010, akan tetapi terjadi peningkatan produksi kedelai.

Berdasarkan Tabel 1 dan 2 di atas, maka produktivitas kedelai di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2010 hingga 2015 dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini

Tabel 3
Produktivitas Kedelai menurut Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2010-2015

No	Kecamatan	Produktivitas (Kuintal/Ha)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pesanggaran	16,00	18,02	18,02	18,20	18,01	17,99
2	Siliragung	15,90	18,76	16,76	18,23	17,78	17,45
3	Bangorejo	15,05	18,51	19,12	19,17	16,59	18,71
4	Purwoharjo	18,71	18,17	21,81	20,82	19,39	20,84
5	Tegaldimo	18,78	18,19	20,12	20,18	17,62	18,10
6	Muncar	15,99	18,04	19,63	20,99	22,19	18,99
7	Cluring	15,99	20,02	18,63	18,78	16,29	16,54
8	Gambiran	22,75	17,90	18,25	18,97	16,21	16,74
9	Tegalsari	16,26	16,46	18,64	18,82	16,34	16,62
10	Glenmore	0	0	0	0	0	0
11	Kalibaru	0	0	0	0	0	0
12	Genteng	15,70	18,93	19,57	18,07	13,00	14,60

13	Srono	15,75	19,90	18,34	18,64	17,66	16,02
14	Rogojampi	15,24	19,77	16,75	18,83	15,42	15,19
15	Kabat	0	19,08	16,77	18,33	15,85	0
16	Singojuruh	15,00	17,86	17,16	20,00	0,00	14,87
17	Sempu	15,81	19,00	0	18,12	16	15,94
18	Songgon	12,14	14,11	0	0	0	0
19	Glagah	0	0	0	0	10	0
20	Licin	0	0	0	0	0	0
21	Banyuwangi	15,81	17,50	0	0	0	0
22	Giri	0	0	0	0	0	0
23	Kalipuro	16,00	18,50	16,85	0	15	15,00
24	Wongsorejo	16,10	18,25	17,00	17,76	16,75	16,38
Banyuwangi		17,57	18,32	20,00	19,82	18,32	18,35

Sumber: BPS Kab. Banyuwangi, 2011-2016

Mengacu pada Tabel 3 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2010 sampai 2015 produktivitas rata-rata kedelai di Kabupaten Banyuwangi sebesar 1,87 ton/ha. Sedangkan secara berturut-turut, kecamatan dengan produktivitas kedelai tertinggi pada tahun 2015 melampaui produktivitas Kabupaten Banyuwangi yaitu Kecamatan Purwoharjo 2,08 ton/ha, Muncar 1,90 ton/ha, dan Bangorejo 1,87 ton/ha.

Perspektif Teori Modernisasi pada Peran Kabupaten Banyuwangi terhadap Ketahanan Pangan Nasional

Pengembangan kawasan pertanian berdasarkan pada komoditas unggulan, baik komoditas unggulan nasional, komoditas unggulan provinsi, maupun komoditas unggulan kabupaten/kota menunjukkan pendekatan pembangunan yang berbasis perbedaan potensi lingkungan alam. Suatu daerah dikembangkan komoditas tertentu karena didukung oleh potensi lingkungan alamnya. Daerah-daerah

yang mempunyai karakteristik fisik yang sama untuk suatu komoditas tertentu, misalnya kondisi kesamaan iklim, dan kesamaan fisik tanah dikembangkan komoditas yang sama sebagai suatu pengembangan kawasan pertanian. Dalam pandangan teori naturalistik, Peet dan Hartwick (2009) mengatakan bahwa lingkungan alam membuat manusia dan masyarakat memiliki potensi yang berbeda dalam pembangunan. Demikian pula, pengembangan kawasan pertanian membuat aktivitas masyarakat terpolakan berdasarkan potensi lingkungan alamnya. Menurut S. N. Eisenstadt (1923) dalam Peet dan Hartwick (2009), dalam ruang ekonomi (*in the economic sphere*), modernisasi berarti adanya spesialisasi aktivitas ekonomi dan peran pekerjaan. Data BPS Kabupaten Banyuwangi menunjukkan, dibandingkan dengan sektor-sektor lain, pada tahun 2015 sektor pertanian masih mendominasi penyerapan tenaga kerja yaitu tercatat sebanyak 379.343 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi

sektor utama dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Spesialisasi aktivitas dan peran pekerjaan masyarakat Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu lokasi pengembangan kedelai oleh pemerintah, menunjukkan peran Kabupaten Banyuwangi untuk menjamin terpenuhinya salah unsur ketahanan pangan, yaitu ketersediaan (*availability*) kedelai pada skala nasional.

Proposisi dasar dari McClelland sebagai seorang psikolog berpendapat bahwa segala bentuk perubahan yang terjadi dalam modernisasi atau pembangunan sebuah negara ditentukan oleh motivasi pencapaian prestasi tinggi yang dimiliki oleh tiap individu di negara tersebut. McClelland menjadikan prestasi masing-masing manusia sebagai indikator utama dari modernisasi. Jika ada sekian banyak prestasi bermutu tinggi dari warga sebuah negara, maka pembangunan dapat dikatakan berhasil. Namun jika semakin rendah prestasi yang diraih warga suatu negara, maka dapat dipastikan bahwa pembangunan telah gagal. Pencapaian prestasi ini ditentukan oleh *need for achievement* yang dimiliki oleh tiap orang di negara tersebut (Finkel dan Gable, 1971 dalam Musthofa, 2007). Berkaitan dengan

need for achievement (n-ach), Kabupaten Banyuwangi mempunyai produktivitas kedelai yang berada di atas dibandingkan produktivitas Provinsi Jawa Timur dan nasional, seperti terlihat pada Tabel 4 di bawah.

Sesuai Tabel 4, nampak bahwa dari tahun 2010 hingga 2015 rata-rata produktivitas kedelai Kabupaten Banyuwangi mencapai 18,71 kuintal perhektar, Provinsi Jawa Timur mencapai 15,57 kuintal perhektar, dan rata-rata produktivitas kedelai nasional hanya 14,60 kuintal perhektar. Hal ini menunjukkan, produktivitas kedelai Kabupaten Banyuwangi lebih tinggi dibandingkan produktivitas kedelai Provinsi Jawa Timur, dan nasional.

Sebagai salah satu lumbung kedelai nasional, Kementerian Pertanian (Kementan) menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu daerah pengembangan kedelai varietas unggul baru (VUB), dan produktivitasnya mencapai 30 kuintal perhektar, melampaui rata-rata produktivitas kedelai nasional yang 15 kuintal perhektar. Demikian pula, Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah percontohan Gelar Inovasi

Tabel 4
Produktivitas Kedelai Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional
Tahun 2010–2015

No	Wilayah	Produktivitas (Kuintal/Ha)						Rata-rata
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Banyuwangi	17,57	18,32	20,00	19,82	18,32	18,35	18,72
2	Jawa Timur	13,75	14,52	16,39	15,64	16,54	16,58	15,57
3	Indonesia	13,73	13,68	14,85	14,16	15,51	15,68	14,60

Sumber: BPS Indonesia, BPS Kabupaten Banyuwangi 2010-2015

Teknologi Kementerian Pertanian untuk peningkatan produksi kedelai dengan bibit VUB karena potensinya (www.banyuwangikab.go.id, 2015). Berkaitan dengan upaya peningkatan produktivitas kedelai, maka salah satu inovasi yang dapat diuji coba adalah hasil penemuan Adi Wijaya dan Tjandramukti. Iskan (2013) menjelaskan Adi Widjaja, pemenang Wirausaha Mandiri Tahun 2013, dan ayahnya Tjandramukti. Penemuan tersebut menunjukkan hasil bahwa produktivitas kedelai yang di kembangkannya dapat mencapai 3,4 ton/hektar dengan masa panen dalam 75 hari. Kalau penemuan Adi ini dikembangkan, maka gugurlah tesis selama ini bahwa kedelai tidak cocok ditanam di negara tropis seperti Indonesia. Selama ini *text book* mengatakan bahwa kedelai hanya cocok ditanam di negara subtropik yang mataharinya bersinar lebih panjang. Penelitian tersebut berhasil membuktikan bagaimana sinar yang pendek bisa ditangkap maksimal sehingga hasilnya sama dengan sinar yang panjang. Tjandramukti fokus membuat daun kedelai yang mampu menangkap sinar dalam waktu yang lebih pendek tapi daya serapnya lebih besar. Tjandramukti justru ingin menciptakan daun kedelai yang tebal. Agar posisi daun tidak mudah melengkung saat ditimpa terik matahari. Lalu ruas-ruas batang kedelai dibuat pendek untuk efektivitas sistem transportasi. Untuk mewujudkan dua hal itu (daun tebal dan ruas pendek) harus dibuat pupuk khusus yang berbasis kotoran sapi.

Keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dengan produktivitas kedelai yang lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur dan nasional, serta sebagai salah satu daerah, baik untuk pengembangan kedelai varietas

unggul baru (VUB), maupun percontohan Gelar Inovasi Teknologi Kementerian Pertanian, menunjukkan peran penting Kabupaten Banyuwangi dalam ketahanan pangan nasional. Serangkaian capaian prestasi yang diperoleh Kabupaten Banyuwangi ini dalam perspektif teori modernisasi, selain merefleksikan *need for achievement (n-ach)* sebagai indikator keberhasilan pembangunan, juga didukung oleh adanya semangat bekerja keras untuk meraih kesuksesan sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber.

Peningkatan produksi kedelai dalam negeri sangat berperan penting dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurut Subandi (2008) perluasan areal tanam merupakan salah satu upaya yang berpotensi besar untuk dapat mempercepat peningkatan produksi kedelai nasional. Walaupun Kabupaten Banyuwangi dikenal sebagai lumbung kedelai dan mampu menghasilkan produktivitas kedelai di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional, tetapi patut menjadi perhatian bahwa berdasarkan data statistik sebagaimana pada tabel 1, luas panen kedelai mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan, dan persaingan dengan komoditas lainnya yang lebih menguntungkan. Kondisi ini menunjukkan peran strategis pemerintah daerah dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang sinergis dan terintegrasi, agar pemerintah daerah dapat mencermati adanya alih fungsi lahan yang berdampak pada produksi kedelai nasional. Upaya berupa penguatan kelembagaan dapat menjadi salah satu pilihan sebagai bagian dari upaya perubahan budaya masyarakat. Weber dan Hoselitz dalam

Peet dan Hartwick (2009) menekankan perubahan budaya sebagai prakondisi untuk pengembangan ekonomi.

Alternatif lain untuk mengatasi terjadinya penurunan luas panen kedelai di Kabupaten Banyuwangi, dapat dilakukan dengan investasi. Investasi menjadi persoalan penting bagi Domar dan Harrod dalam tiap proses pembangunan di sebuah negara. Dapat juga dikatakan bahwa investasi adalah standar keberhasilan dalam proses pembangunan (Blomstrom dan Hettne, 1984 dalam Musthofa, 2007). Selanjutnya Domar dan Harrod menawarkan dua strategi untuk menciptakan tingginya suhu investasi dan tabungan dari warga sebuah negara. *Pertama*, dengan melakukan penanaman modal domestik, dan *kedua*, menarik investasi dan hutang luar negeri (Musthofa, 2007). di antara kedua strategi tersebut, patut untuk dicermati adalah memilih hutang luar negeri dalam menciptakan adanya investasi. Hal ini disebabkan implikasi yang ditimbulkan dapat juga berdampak pada ketahanan pangan nasional.

Pertengahan tahun 1997 Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang cukup parah. pada tahun 1998 Indonesia terpaksa menambah hutang luar negeri yang cukup besar dari IMF. Terkait dengan hutang itu, maka Indonesia harus tunduk pada sejumlah persyaratan yang dibuat IMF yang kemudian dijabarkan dalam *Letter of Intent* (LOI), termasuk kebijakan pangan, tidak terkecuali dengan kedelai (Supadi, 2009).

Menurut Sawit dan Rusastra (2005) dalam (Supadi, 2009), Indonesia mengambil keputusan yang begitu

cepat. Hampir semua aspek yang terkait dengan kebijakan pangan Indonesia tidak mempunyai kesempatan untuk mempelajarinya secara baik dan tidak melibatkan para ahli dalam negeri untuk menyusun perubahan, memilih alternatif dan pentahapan dalam melaksanakannya. Dampak dari perubahan yang begitu cepat, adalah terlihat pada laju ketergantungan impor yang begitu pesat, harga pangan merosot, produksi tidak membaik dan insentif berusahatani khususnya pangan makin merosot. Sebelum tahun 1998 impor kedelai dimonopoli oleh Bulog. Namun sejak tahun 1998 impor kedelai menjadi impor umum, Bulog diperlakukan sama dengan importir lain di dalam melakukan impor. dengan kata lain, monopoli impor Bulog dicabut, dan sejak saat itu bea masuk kedelai menjadi nol persen. Kebijakan perdagangan yang terlalu liberal dan sangat tidak berpihak kepada petani dalam negeri dan dihapuskannya wewenang Bulog sebagai lembaga stabilitas harga pangan merupakan penyebab rontoknya satu per satu benteng ketahanan pangan Indonesia. Hancurnya sektor pangan Indonesia merupakan dampak dari *Letter of Intent* (LOI) dengan IMF Januari 1998, yang paling fatal menurut Rachbini dan Wibowo (2008) dalam (Supadi, 2009) adalah: 1) dihapuskannya tarif impor bahan pangan menjadi nol persen; 2) dicabutnya monopoli impor Bulog; 3) dibatasinya peran Bulog dan; 4) larangan pemberian kredit likuiditas bagi Bulog.

SIMPULAN

Spesialisasi aktivitas dan peran pekerjaan masyarakat Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu lokasi pengembangan kedelai nasional,

menunjukkan peran Kabupaten Banyuwangi untuk menjamin terpenuhinya salah unsur ketahanan pangan, yaitu ketersediaan (*availability*) kedelai pada skala nasional.

Keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dengan produktivitas kedelai lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur dan nasional; salah satu daerah pengembangan kedelai varietas unggul baru (VUB), dan percontohan Gelar Inovasi Teknologi Kementerian Pertanian, menunjukkan peran penting Kabupaten Banyuwangi dalam ketahanan pangan nasional. Serangkaian capaian prestasi yang diperoleh Kabupaten Banyuwangi tersebut dalam perspektif teori modernisasi mereflesikan *need for achievement (n-ach)*, dan semangat bekerja keras untuk meraih kesuksesan.

Sesuai perspektif teori modernisasi, penurunan luas panen kedelai di Kabupaten Banyuwangi yang disebabkan alih fungsi lahan, dan persaingan dengan komoditas lainnya yang lebih menguntungkan, dapat diupayakan melalui penguatan kelembagaan sebagai bagian dari upaya perubahan budaya masyarakat. Alternatif lain untuk mengatasi penurunan luas panen kedelai di Kabupaten Banyuwangi dapat dilakukan melalui investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2016. *Produktivitas Kedelai Tahun 1993-2015*. Jakarta: BPS.
- _____. 2011. *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2010*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- _____. 2012. *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2011*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- _____. 2013. *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2012*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- _____. 2014. *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2013*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- _____. 2015. *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2014*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- _____. 2016. *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2015*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- Baharsjah, S. 2004. *Orientasi Kebijakan Pangan Harus ke Arah Swasembada*. Kompas 14 Januari 2004. Lembaran Bisnis dan Investasi.
- Budiman, A. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Antar Universitas Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia
- Fagi, A.M., Las, I., dan Syam, M. 2002. *Penelitian Padi Menjawab Tantangan Ketahanan Pangan Nasional*. Balai Penelitian Padi. Badan Litbang Pertanian.
- Fakih, M. 2002. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gill, S. 1993. *Neo-Liberalism and The Shift Toward a US-Centered Transnational Hegemony, in Henk Overbeek, ed., Restructuring Hegemony in The Global Political Economy: The Rise to Transnational Liberalism in The 1980s*. London: Routledge.
- Iskan, D. 2013. *Titik Cerah Swasembada Kedelai*. <http://www.antaranews.com/berita/413773/titik-cerah-swasembada-kedelai>
- Kamiel, Muhammad. 2011. *Permasalahan Kemiskinan di Indonesia dalam*

- Perspektif Teori Modernisasi dan Dependensi.* www.kamielmuhammad.blogspot.com
- Kementerian Pertanian. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.* Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Musthofa, C. 2007. *Studi Pembangunan.* Surabaya: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel
- Peet, R., dan Hartwick, E. 2009. *Theories of Development: Contentions, Argument, Alternatives.* United State of America: The Guilford Publication
- Purba, A. 2013. *Lumbung Kedelai Jawa Timur Berada di Banyuwangi.* <http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/47826/lumbung-kedelai-jawa-timur-berada-di-kabupaten-banyuwangi>.
- Rasahan, C A. 1999. *Kebijakan Pembangunan Pertanian Untuk Mencapai Ketahanan Pangan Berkelanjutan. Dalam: Tonggak Kemajuan Teknologi Produksi Tanaman Pangan. Konsep dan Strategi Peningkatan roduksi Pangan.* Puslitbang Tanaman Pangan. Badan Litbang Pertanian. Hal 1-11.
- Sinulingga, N. 2006. *Memaknai Hasil-hasil Pembangunan Pertanian Pro Petani. Dialog Publik embangunan Pertanian Tahun 2006.* Departemen Pertanian.
- Supadi. 2009. *Dampak Impor Kedelai Berkelanjutan terhadap Ketahanan Pangan. Analisis Kebijakan Pertanian.* Volume 7 No. 1, Maret 2009: 87 – 102
- Yohanes, S. 2013. *Kedelai: Kenapa Baru Ribut Sekarang?* <http://stevenyohanes.wordpress.com/2013/09/06/kedelai-kenapa-baru-ribut-sekarang/>